



ANALISIS NORMATIF PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA UMKM DI KOTA SORONG BERDASARKAN SAK EMKM

Meyta Longkutoy

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Papua

e-mail: meytalongkutoy@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi keuangan pada UMKM berdasarkan ketentuan SAK EMKM serta menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha, pemerintah, dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan UMKM di Kota Sorong. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis penerapan akuntansi keuangan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam SAK EMKM. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pelaku usaha belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Sistem pencatatan keuangan yang dilakukan masih bersifat sederhana dan terbatas pada pencatatan pemasukan serta pengeluaran harian tanpa disertai penyusunan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, maupun catatan atas laporan keuangan secara lengkap. Belum optimalnya penerapan SAK EMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi keuangan dan isi ketentuan dalam SAK EMKM.

Kata kunci : Penerapan Akuntansi Keuangan; SAK EMKM; UMKM

Abstract

This research is expected to provide an overview of the application of financial accounting principles to MSMEs based on the provisions of the Indonesian Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Enterprises (SAK EMKM) and serve as evaluation material for business actors, the government, and related parties in improving the quality of MSME financial management in Sorong City. The research method is qualitative with a normative approach. The normative approach was used to analyze the application of financial accounting based on the provisions contained in the SAK EMKM. The results show that most business actors have not yet implemented the preparation of financial reports in accordance with the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM). The financial recording system used is still simple and limited to recording daily income and expenses without the preparation of a comprehensive statement of financial position, profit and loss statement, or notes to the financial statements. The suboptimal implementation of SAK EMKM is influenced by several main factors. The first factor is the low level of knowledge and understanding of financial accounting and the provisions contained in SAK EMKM among MSMEs.

Keywords: application of financial accounting; SAK EMKM; MSMEs

1. PENDAHULUAN

Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis ekonomi. Keberadaan UMKM telah menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih mengandalkan sektor perdagangan kecil, usaha keluarga, dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas.

Namun demikian, pertumbuhan jumlah UMKM belum sepenuhnya diikuti dengan kualitas pengelolaan keuangan yang memadai (Idrus & Rastina, 2026).

Salah satu permasalahan utama yang masih sering ditemukan pada pelaku UMKM adalah rendahnya pemahaman mengenai pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Sebagian besar pelaku usaha masih melakukan pencatatan secara sederhana, bahkan tidak sedikit yang mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan menjadi kurang akurat dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan usaha. Selain itu, lemahnya sistem pencatatan keuangan juga berdampak pada rendahnya kemampuan UMKM dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan karena tidak memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar (Zulfikar et al., 2022).

Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM, Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Standar ini disusun secara sederhana agar mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (Kusuma & Lutfiany, 2019). SAK EMKM mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018 dan menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan (Simanjuntak et al., 2021). Kehadiran standar ini diharapkan mampu mendorong terciptanya laporan keuangan yang relevan, andal, serta dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

SAK EMKM memberikan kemudahan dalam penyajian laporan keuangan karena hanya mencakup komponen dasar seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Penyederhanaan tersebut bertujuan agar UMKM dapat menyusun laporan keuangan tanpa harus memiliki pemahaman akuntansi yang kompleks. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam penerapan SAK EMKM, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya tingkat literasi akuntansi, kurangnya sosialisasi, serta minimnya pendampingan dari pihak terkait. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan standar tersebut secara optimal.

Pendekatan akuntansi keuangan berdasarkan SAK EMKM menjadi penting untuk dikaji secara normatif karena standar tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi usaha. Analisis normatif diperlukan untuk menilai sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam SAK EMKM telah sesuai dengan kebutuhan UMKM dan bagaimana implementasinya dalam praktik pengelolaan keuangan usaha. Pendekatan normatif juga memungkinkan penelitian untuk mengkaji kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Selain itu, penerapan SAK EMKM memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas tata kelola usaha (Mulyani et al., 2022). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi dapat membantu pelaku usaha dalam mengevaluasi kondisi keuangan, mengontrol arus kas, menghitung laba secara tepat, serta merencanakan pengembangan usaha di masa mendatang. Dari sisi eksternal, laporan keuangan yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan investor, kreditur, dan pemerintah terhadap keberlangsungan usaha yang dijalankan.

Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara tujuan penerbitan SAK EMKM dengan kondisi aktual pelaku UMKM. Banyak usaha kecil yang menganggap penyusunan laporan keuangan sebagai sesuatu yang rumit dan tidak terlalu penting. Pandangan tersebut menyebabkan rendahnya kesadaran dalam menerapkan standar akuntansi secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai pendekatan akuntansi keuangan berdasarkan SAK EMKM agar dapat diketahui berbagai faktor yang memengaruhi penerapannya serta implikasinya terhadap pengelolaan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “Analisis Normatif Pendekatan Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK EMKM” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi keuangan pada UMKM

berdasarkan ketentuan SAK EMKM serta menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha, pemerintah, dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan UMKM di Kota Sorong.

2. METODE

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif (Murdiyanto, 2020). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis penerapan akuntansi keuangan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam SAK EMKM. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami fenomena penerapan akuntansi keuangan pada UMKM secara mendalam melalui analisis terhadap praktik pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.

2) Fokus Penelitian

Fokus penelitian meliputi:

- a) Penerapan akuntansi keuangan pada UMKM;
- b) Kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan SAK EMKM;
- c) Hambatan penerapan SAK EMKM;
- d) Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan UMKM.

3) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada pelaku UMKM di Kota Sorong; yang menjadi objek penelitian sesuai dengan karakteristik usaha yang ditentukan peneliti.

4) Jenis dan Sumber Data

Data primer diperoleh melalui: Wawancara; Observasi; Dokumentasi laporan keuangan UMKM. Data sekunder diperoleh dari: Buku; Jurnal ilmiah; SAK EMKM; Dokumen pendukung lainnya.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a) Observasi terhadap praktik pencatatan keuangan UMKM;
- b) Wawancara dengan pemilik usaha;
- c) Dokumentasi laporan keuangan dan bukti transaksi.

6) Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan data hasil penelitian berdasarkan teori dan ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Langkah-langkah teknik analisis data adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi praktik pencatatan dan penyusunan laporan keuangan UMKM;
- b) Membandingkan praktik tersebut dengan ketentuan dalam SAK EMKM;
- c) Menganalisis tingkat kesesuaian penerapan standar;
- d) Menarik kesimpulan mengenai implementasi akuntansi keuangan berdasarkan SAK EMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kehadiran standar ini diharapkan mampu membantu pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan yang sederhana, mudah dipahami, serta sesuai dengan karakteristik usaha kecil. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum menerapkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam standar akuntansi dengan praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh UMKM di lapangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih menggunakan sistem pencatatan keuangan yang sangat sederhana. Pencatatan yang dilakukan umumnya hanya berupa

catatan pemasukan dan pengeluaran harian tanpa adanya penyusunan laporan keuangan yang lengkap. Sebagian pelaku usaha bahkan tidak melakukan pencatatan secara rutin dan hanya mengandalkan ingatan dalam menghitung hasil penjualan maupun keuntungan usaha. Kondisi ini menyebabkan informasi keuangan usaha sulit diketahui secara pasti dan menghambat proses evaluasi terhadap perkembangan usaha.

Dalam ketentuan SAK EMKM, laporan keuangan setidaknya terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM belum mampu menyusun ketiga komponen tersebut. Pelaku usaha cenderung menganggap bahwa pencatatan sederhana sudah cukup untuk menjalankan usaha sehari-hari. Persepsi tersebut menunjukkan bahwa fungsi laporan keuangan belum dipahami sebagai alat pengendalian usaha dan dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudiantoro dan Siregar yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan UMKM di Indonesia masih rendah karena sebagian besar pelaku usaha belum memahami pentingnya penerapan standar akuntansi dalam pengelolaan usaha. Rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan akuntansi dan minimnya kemampuan administrasi keuangan yang dimiliki pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara, faktor utama yang menyebabkan belum diterapkannya SAK EMKM adalah rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap akuntansi keuangan dan isi ketentuan dalam SAK EMKM. Sebagian besar informan menyatakan belum pernah mempelajari akuntansi secara formal dan tidak memahami tata cara penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Pelaku usaha umumnya hanya mengetahui bahwa keuntungan diperoleh dari selisih antara hasil penjualan dan modal yang dikeluarkan tanpa melakukan pencatatan yang sistematis terhadap aset, utang, modal, maupun biaya operasional usaha.

Rendahnya pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa literasi akuntansi pada UMKM masih sangat terbatas. Padahal, pemahaman mengenai akuntansi memiliki peranan penting dalam mendukung keberlangsungan usaha. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan yang baik dapat membantu pelaku usaha dalam mengetahui kondisi usaha, mengontrol arus kas, menghitung laba secara tepat, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan usaha. Tanpa adanya laporan keuangan yang memadai, pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam mengevaluasi perkembangan usaha secara objektif.

Selain itu, rendahnya pemahaman akuntansi juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan latar belakang pelaku usaha yang beragam. Sebagian besar pelaku UMKM lebih fokus pada aktivitas produksi dan penjualan dibandingkan administrasi keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan keuangan belum menjadi prioritas utama dalam menjalankan usaha. Akibatnya, pencatatan transaksi hanya dilakukan secara sederhana dan tidak mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum pernah memperoleh pelatihan maupun sosialisasi mengenai SAK EMKM. Informan menyampaikan bahwa selama menjalankan usaha, mereka belum pernah mendapatkan pendampingan terkait tata cara penyusunan laporan keuangan berbasis standar akuntansi. Hal tersebut menyebabkan pelaku usaha tidak memahami bagaimana cara menerapkan SAK EMKM dalam kegiatan usaha yang mereka jalankan.

Kurangnya pelatihan dan sosialisasi menjadi salah satu penyebab utama rendahnya tingkat penerapan SAK EMKM pada UMKM. Padahal, pelatihan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan secara benar. Menurut penelitian Narsa, implementasi SAK EMKM dapat berjalan dengan baik apabila pelaku usaha memperoleh pendampingan dan edukasi secara berkelanjutan. Melalui pelatihan, pelaku usaha dapat memahami teknik pencatatan transaksi, penyusunan laporan laba rugi, pengelolaan aset, serta pentingnya laporan keuangan dalam mendukung pengembangan usaha.

Kurangnya sosialisasi juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait pemberdayaan UMKM belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha. Pemerintah dan lembaga terkait sebenarnya memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas administrasi keuangan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan edukasi akuntansi. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum merasakan adanya program pembinaan yang berfokus pada penerapan SAK EMKM.

Selain faktor pengetahuan dan pelatihan, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sistem penjualan pada sebagian besar UMKM masih dilakukan secara sederhana dan tradisional. Penjualan dilakukan secara langsung kepada konsumen dengan pencatatan manual yang terbatas. Bahkan beberapa pelaku usaha tidak memiliki bukti transaksi yang lengkap sehingga sulit melakukan rekapitulasi penjualan secara akurat. Kondisi tersebut menyebabkan penyusunan laporan keuangan menjadi semakin sulit dilakukan.

Sistem penjualan yang sederhana menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi usaha masih bersifat konvensional. Sebagian besar pelaku usaha belum memanfaatkan teknologi digital dalam pencatatan transaksi maupun pengelolaan keuangan usaha. Padahal penggunaan teknologi sederhana seperti aplikasi pencatatan keuangan dapat membantu pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan secara lebih mudah dan teratur.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Purba yang menjelaskan bahwa sebagian besar UMKM masih menggunakan sistem administrasi tradisional sehingga penerapan standar akuntansi belum berjalan optimal. Penggunaan pencatatan manual menyebabkan data transaksi mudah hilang, tidak terdokumentasi dengan baik, dan sulit digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Dari perspektif normatif, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan keuangan UMKM dengan ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM. Dalam pendekatan normatif, standar akuntansi menjadi pedoman yang seharusnya diterapkan oleh setiap entitas usaha dalam menyusun laporan keuangan. Namun pada kenyataannya, sebagian besar UMKM belum mampu memenuhi ketentuan tersebut karena berbagai keterbatasan yang dimiliki.

Ketidaksesuaian tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas informasi keuangan, tetapi juga memengaruhi kemampuan UMKM dalam mengembangkan usaha. Laporan keuangan yang tidak tersusun dengan baik menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. Perbankan dan lembaga pembiayaan umumnya mensyaratkan laporan keuangan sebagai salah satu dokumen utama dalam pengajuan kredit usaha. Ketika UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang memadai, maka peluang memperoleh modal usaha menjadi semakin terbatas.

Selain itu, lemahnya sistem pencatatan keuangan juga berdampak pada rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengontrol arus kas dan menghitung keuntungan usaha secara akurat. Banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui secara pasti jumlah keuntungan yang diperoleh karena pencatatan transaksi tidak dilakukan secara teratur. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Walaupun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki keinginan untuk mempelajari sistem pencatatan keuangan yang lebih baik apabila tersedia pelatihan dan pendampingan yang mudah dipahami. Pelaku usaha menyadari bahwa laporan keuangan memiliki manfaat penting dalam pengembangan usaha, terutama dalam mengetahui kondisi keuangan dan meningkatkan peluang memperoleh bantuan modal usaha.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM masih memiliki peluang untuk ditingkatkan melalui pendekatan edukatif dan pembinaan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan organisasi profesi akuntansi perlu bekerja sama dalam memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Program pelatihan sebaiknya disusun

secara sederhana dan praktis agar mudah dipahami oleh pelaku usaha dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Selain pelatihan, pemanfaatan teknologi digital juga perlu diperkenalkan kepada pelaku UMKM untuk membantu proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Penggunaan aplikasi pencatatan keuangan sederhana dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas administrasi usaha tanpa memerlukan kemampuan akuntansi yang terlalu kompleks.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum optimalnya penerapan SAK EMKM pada UMKM disebabkan oleh rendahnya pemahaman akuntansi, belum adanya pelatihan terkait SAK EMKM, serta sistem penjualan yang masih sederhana dan tradisional. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan literasi akuntansi dan kualitas pengelolaan keuangan UMKM agar mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Penerapan standar akuntansi yang baik diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan usaha UMKM di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Sistem pencatatan keuangan yang dilakukan masih bersifat sederhana dan terbatas pada pencatatan pemasukan serta pengeluaran harian tanpa disertai penyusunan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, maupun catatan atas laporan keuangan secara lengkap.

Belum optimalnya penerapan SAK EMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mengenai akuntansi keuangan dan isi ketentuan dalam SAK EMKM. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami pentingnya laporan keuangan sebagai alat pengendalian usaha dan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Faktor kedua adalah belum adanya pelatihan, sosialisasi, maupun pendampingan terkait penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EMKM sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan dalam menerapkan standar tersebut dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Faktor lainnya adalah sistem penjualan dan administrasi usaha yang masih dilakukan secara sederhana dan tradisional. Pencatatan transaksi yang belum teratur menyebabkan informasi keuangan usaha tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan UMKM masih memerlukan pembinaan dan pengembangan yang lebih serius.

Secara normatif, praktik pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh sebagian besar UMKM belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SAK EMKM. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki keinginan untuk mempelajari sistem pencatatan keuangan yang lebih baik apabila tersedia pelatihan dan pendampingan yang mudah dipahami. Oleh karena itu, penerapan SAK EMKM masih memiliki peluang untuk ditingkatkan melalui edukasi dan pembinaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afi, S. N., Maslichah, & Rudhiningtyas, D. A. (2024). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAK EMKM pada UMKM di Malang Raya. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(01).
- Candra, H., & Hidayatullah, S. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI SAK-EMKM DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI KEUANGAN PADA UMKM SEKTOR PERDAGANGAN DI TANGERANG SELATAN. *Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis*, 1(2).
- Darmasari dan Wahyuni. (2020). Pengaruh Sosialisasi SAK EMKM, Pemahaman Akuntansi, dan Tingkat Kesiapan Pelaku UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM dalam Penyusunan

- Laporan Keuangan pada UMKM di Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha e-ISSN: 2614-1930, 11(2))*.
- Idrus, M. I., & Rastina. (2026). The implementation of financial statements based on sak emkm in micro, small, and medium enterprises (case study of mutiara laundry umkm). *Multidisciplinary Science Journal*, 8. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2026212>
- Kusuma, I. C., & Lutfiany, V. (2019). PERSEPSI UMKM DALAM MEMAHAMI SAK EMKM. *JURNAL AKUNIDA*, 4(2). <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1550>
- Mulyani, H. S., Suparto, L., Sudirno, D., Masduki, & Prihartini, E. (2022). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Desa Berdasarkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Di Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(4), 563–568. <https://doi.org/10.31949/jb.v3i4.2959>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Primayudia, D. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Budidaya Ikan Nila di Keramba “Sejahtera” Berbasis SAK EMKM. In *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*.
- Purwanti, L., & Fatmawati, D. S. A. (2021). The meaning of financial accounting standards for micro, small and medium entities (SAK EMKM) during the covid-19 pandemic. *Estudios de Economia Aplicada*, 39(12). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i12.6001>
- Simanjuntak, N. H., Sumual, T. E. M., & Bacilius, A. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus pada UMKM Restoran Delli Tomohon). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3).
- Sumarlin, T. (2021). DASAR AKUNTANSI KEUANGAN. In *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*.
- Zulfikar, R., Astuti, K. D., & Ismail, T. (2022). Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) in Indonesia: Factors, and Implication. *Quality - Access to Success*, 23(189). <https://doi.org/10.47750/QAS/23.189.15>